

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA TANAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi

Disusun oleh:

STEFANI EVLYN RUMONDOR
21.M1.0019

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SENGKETA TANAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Stefani Evlyn Rumondor

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Konflik sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) merupakan persoalan yang sering kali melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak lain, khususnya di wilayah yang masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menangani konflik sengketa tanah yang terjadi di Negeri Suli, Negeri Liang, dan Negeri Kabauw. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen dari putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya manajemen konflik di selesaikan kepada pemerintah egeri dan saniri negeri, menjalankan beberapa metode dalam manajemen konflik, seperti negosiasi, mediasi, hingga adjudikasi melalui jalur hukum. Namun, implementasi strategi ini tidak selalu berjalan efektif karena beberapa hambatan, seperti keterbatasan kewenangan, kurangnya bukti kepemilikan yang sah, dan perbedaan persepsi antara pihak yang bersengketa. Pada kasus yang terjadi di ketiga negeri ini, negosiasi tidak membuahkan hasil sehingga penyelesaian berakhir di pengadilan.

Kata Kunci: Manajemen konflik, pemerintah daerah, sengketa tanah, tanah adat, teori negosiasi.

CONFLICT MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT IN LAND DISPUTES IN CENTRAL MALUKU REGENCY

Stefani Evlyn Rumondor
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

ABSTRACT

Land dispute conflicts occurring in Central Maluku Regency (Malteng) are issues that often involve indigenous communities, the government, and other parties, particularly in areas still strongly influenced by customary law. This study aims to analyze how the local government of Central Maluku Regency manages conflicts related to land disputes in Negeri Suli, Negeri Liang, and Negeri Kabauw. This research employs a qualitative method with a case study approach, using data collection techniques such as interviews and document analysis from court decisions. The findings show that conflict management efforts are delegated to the traditional village government and the Saniri council, implementing several conflict management methods such as negotiation, mediation, and adjudication through legal channels. However, the implementation of these strategies is not always effective due to several obstacles, such as limited authority, lack of valid land ownership documents, and differing perceptions between the disputing parties. In the cases that occurred in these three villages, negotiations failed to yield results, leading to dispute resolution through the court.

Keywords: Conflict management, land disputes, negotiation theory, local government, customary land.